



Kinerja Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar

**Nurharsya Khaer Hanafi¹, Novayanti Sopia Rukmana², Ahmad Fudhail Majid³,
Hasriah⁴**

Universitas Negeri Makassar
Email: nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstrak. Reformasi dalam perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem Pendidikan di Indonesia. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) hadir sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Kinerja Dewan Pengawas UNM dalam penyelenggaraan Badan Layanan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara tinjauan kepustakaan dilakukan pengumpulan dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dan dengan Penelitian lapangan. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa agenda yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas UNM telah mengalami perkembangan yang baik dalam proses pengawasan, rekomendasi dan pemberian *treatment*. Dewan pengawas memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan, memantau dan mengawasi capaian program kerja terlaksana sesuai dengan target, memberikan rekomendasi dan *treatment* terkait permasalahan yang dihadapi pejabat pengelola Badan Layanan Umum.

Kata Kunci: Kinerja, Dewan Pengawas, Badan Layanan Umum

PENDAHULUAN

Reformasi dalam perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem Pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada tuntutan perbaikan mutu Pendidikan dan persoalan operasional yang semakin kompleks. Untuk memenuhi fenomena tersebut, perguruan tinggi perlu menyusun Visi Misi serta Strategi perguruan tinggi. Dalam era sekarang ini tuntutan terhadap adanya Good University Governance (GUG) menjadi isu sentral pada perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma, model pengelolaan, persaingan dan sebagainya. Saat ini, perguruan tinggi tidak lagi hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian tetapi perlu menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat penghasil ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman.

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia, olehnya itu pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi penuh terhadap perguruan tinggi Indonesia salah satunya dengan kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Universitas Negeri Makassar sebagai salah satu



Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Status Badan Layanan Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 yang selanjutnya dibentuk Dewan Pengawas (Dewas) BLU UNM yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan BLU UNM. Dewan Pengawas (Dewas) Perguruan tinggi sangat berperan dalam penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran dari Dewas dapat dinilai dari bagaimana kinerja pelaksanaan Dewan Pengawas. Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu. Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan Rivai (Veitzhal,2006). Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Kinerja Dewan Pengawas UNM dalam penyelenggaraan Badan Layanan umum. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mengungkap dan menjelaskan peran Dewan Pengawas dalam Tata Kelola Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan bagaimana kinerja dewan pengawas dalam tata kelola Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik tersebut maka digunakan metode deskriptif.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tinjauan kepustakaan mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan masalah. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, koran atau majalah, internet serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dan Penelitian lapangan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Sugiyono, 2011:231). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai peran dewan pengawas terhadap instansi yang berstatus BLU dan untuk memastikan data yang telah didapat sesuai dengan penerapannya.

Dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan bagian dewan pengawas yang terkait di Universitas Negeri Makassar dan data Sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas (Dewas) merupakan majelis dan setiap keputusannya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Dewas UNM diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan SK Nomor 74616/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan BLU pada umumnya dan memberi nasihat kepada pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

1. Kesesuaian RSB dan RBA

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas UNM di tandai dengan prosedur pengecekan kesesuaian RSB dan RBA. RSB dan RBA yang telah disusun selanjutnya dilaporkan ke Dewas untuk mendapatkan penilaian, dan menjabarkan kendala-kendala serta tindak lanjut. Dewan pengawas UNM memastikan RSB telah diimplementasikan dalam penyusunan RBA dan juga memastikan SPM (terbaru) sudah dimasukkan dalam RSB. Rencana Strategis Bisnis (RSB) UNM 2020-2024 telah dibuat berdasarkan pada formulasi visi, misi dan tujuan BLU UNM, serta telah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLU UNM dan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. Secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan baru RBA TA 2021. Namun terdapat beberapa indikator kinerja semester I Tahun 2021 yang perlu ditingkatkan khususnya pada Prodi terakreditasi internasional, Dosen tetap dari kalangan industri atau kalangan praktisi serta bidang penelitian dan pengabdian.

2. Pengawasan Capaian Kegiatan

Dewan pengawas UNM melakukan *sharing session* terkait program program yang telah dilakukan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar (BLU UNM). Dalam pengawasannya Dewas UNM berkerja sama dan berkoordinasi dengan pengawasan internal yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI). Melakukan rapat setiap dua kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya SPI melakukan pengawasan langsung saat pelaksanaan program, yang kemudian dewan pengawas melakukan hearing dengan SPI. Dewan pengawas baru akan melakukan pengawasan langsung yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan yang bagus atau justru kurang meyakinkan dan bila terjadi masalah yang krusial.

3. Proses Pelaporan Dewan Pengawas UNM

Dewan pengawas melaksanakan pengawasan yang kemudian dilaporkan dalam laporan pelaksanaan tugas dewan pengawas. Jika perlu adanya *hearing* dan klarifikasi mengenai pengumpulan data-data maka akan dilaksanakan *hearing* sebelum pelaporan. *Hearing* juga bisa dilakukan setelah laporan selesai saat sudah di kirim kepada menteri, hal ini dilakukan untuk memberitahukan hasil laporan pada semester ini. Laporan semesteran dilaporkan setiap akhir semester.

Kinerja Layanan berdasarkan hasil pengawasan Dewas

Pada kontrak kinerja tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdapat dua sasaran strategis yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel, serta Layanan Prima. Dua sasaran strategis tersebut terdiri 12 indikator kinerja. Dari 12 indikator tersebut, beberapa indikator kinerja belum mencapai target pada semester I tahun 2021. Hal ini disebabkan, adanya beberapa kebijakan Pemerintah khususnya menghadapi masa tanggap Covid-19 yang mengakibatkan pencairan dana terhambat, mengingat adanya batasan-batasan belanja prioritas khususnya pada awal Semester. Jika dilihat dari ketercapaian semester, persentase capaian indikator kerjanya per semester I tahun 2021 telah mencapai 98%.

Pada kontrak kinerja tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat empat sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja utama. Dari beberapa indikator yang belum tercapai, agar pimpinan BLU UNM melakukan langkah strategis dalam rangka mencapai target kontrak kinerja Rektor UNM baik dengan Dirjen Dikti Kemendikbudristek maupun dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI kedepannya di tahun 2021.

a) Tata Kelola Dan Akuntabilitas Bidang Layanan

Pada bidang tarif layanan kepada mahasiswa dan masyarakat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Mendikbud tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek, PMK tarif layanan, dan Keputusan Rektor UNM tentang UKT mahasiswa). Dokumen standar pelayanan yang dimiliki UNM adalah Standar UNM (standar tridharma sesuai dengan SN-Dikti), Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Laporan Kinerja UNM Semester I tahun 2021 telah disusun dan direviu oleh SPI. Sedangkan laporan capaian kontrak kinerja disampaikan triwulanan melalui aplikasi.

b) Bidang Sdm

Pelaksanaan tata kelola SDM UNM, untuk tenaga PNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tentang implementasi Manajemen PNS, serta berdasarkan petunjuk teknis/edaran dari BKN/pemerintah, dan Kemendikbudristek. Sedangkan pelaksanaan tata kelola SDM berdasarkan ketentuan manajemen PPPK akan dilaksanakan mengikuti petunjuk/edaran Kemendikbudristek dan pemerintah. Mekanisme pendukung tata kelola SDM telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh UNM. Namun demikian beberapa SOP masih perlu disempurnakan.

c) Bidang Keuangan

Pelaksanaan tata kelola keuangan berkaitan dengan pengesahan pendapatan dan belanja BLU, pengelolaan kas dan investasi jangka pendek, pengelolaan hutang,



serta pengelolaan piutang, secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Terkait pelaporan keuangan, UNM telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku PMK 220/PMK.05/2016 Laporan keuangan BLU UNM per 30 Juni 2021 telah disusun dan disampaikan ke Kemendikbudristek dan Kemenkeu.

Hasil dari penelitian ini dewan pengawas melakukan pengawasan melihat kesesuaian RSB dengan RSA sehingga pejabat pengelola BLU UB dapat merealisasikan rencana dengan baik yang terlihat dari progres capaian kegiatan dan pemberian rekomendasi serta treatment kepada pejabat pengelola BLU UB. Kinerja dewan pengawas BLU UB dapat di lihat dengan bagaimana dewan pengawas melakukan tugas dan kewajibannya serta menjalankan wewenangnya sehingga program kerja UB dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Dewan pengawas memberikan rekomendasi dalam kapasitas pengawasan guna menghindari penurunan kinerja yang dapat mengganggu baik proses pelayanan pendidikan maupun program kerja yang telah di tetapkan dalam RSB dan RBA.

KESIMPULAN

Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Dewan Pengawas UNM mengawasi progress capaian kontrak kinerja UNM dengan Kementerian. Setelah proses pengawasan, Dewan Pengawas UNM memberikan rekomendasi (treatment) kepada Badan Pengelolaan Layanan Umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Univeristas Negeri Makassar dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian kami. Penelitian ini merupakan pembiayaan dari dana hibah PNBPN dengan nomor kontrak 3084/UN36.07/LP2M/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler Gary. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Perhalindo.
Dadang Solihin. 2010. Konsep dan Teori Pengawasan. [Internet]. Tersedia di:
<https://www.slideshare.net/DadangSolihin/konsep-dan-teori-pengawasan>
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Laporan Dewan Pengawas BLU UNM Semester I Tahun 2020
Laporan Dewan Pengawas BLU UNM Semester II Tahun 2020
Laporan Dewan Pengawas BLU UNM Semester I Tahun 2021